

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu peristiwa terjadi di kabupaten Rembang, pada tanggal 16 Juni 2014 ratusan warga (mayoritas ibu-ibu) menghadang masuknya alat berat dan mendirikan tenda perjuangan tepat di jalan masuk tapak pabrik semen. Tepat pada hari itu pula terdengar kabar akan ada peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen. Semboyan mereka saat itu hingga sekarang pantang mundur sebelum alat berat ditarik mundur.

Alasan mereka mendirikan tenda karena mereka tidak terlibat saat tahap perizinan perihal pembangunan pabrik dan mereka menolak ruang hidupnya dirampas. Selain itu yang paling utama mereka juga perlu memperjuangkan kelestarian Pegunungan Kendeng sebagai sumber mata air untuk kehidupan. Sejak tenda perjuangan berdiri di jalan masuk tapak pabrik, penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang semakin besar pergerakan politiknya.

Selang sebelas hari kemudian Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) pada tanggal 27 Juni 2014 mengunjungi tenda perjuangan untuk melakukan mediasi antara pihak semen dan pihak warga yang menolak pembangunan pabrik. Gubernur Jawa Tengah memberi waktu satu minggu untuk menghubungi ahli lingkungan hidup yang akan mendampingi warga. Sesudah warga bersedia audiensi, mereka mengirimkan surat kesanggupan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mediasi. Tetapi saat itu mediasi yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Tengah belum terealisasi sama sekali.

Warga kembali menyurati Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 30 Juni 2014 bermaksud siap untuk bertemu, hingga saat itu juga surat tak terbalas. Akhirnya tanggal 01 September 2014 warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Semarang atas terbitnya ijin lingkungan hidup PT. Semen Indonesia (SI) yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah Pegunungan Kendeng Utara.

Selanjutnya berturut-turut ibu-ibu Kendeng melakukan aksi pada tanggal 18-20 November 2014 di Jakarta. Aksi-aksi ini diselenggarakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan, Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI), dan Mahkamah Agung (MA). Aksi-aksi ini bertujuan untuk pemerintah memberhentikan seluruh proses pembangunan PT. SI. Apabila masih berlangsung proses pembangunan maka jaminannya warga bertindak dengan caranya sendiri untuk memberhentikan pabrik.

Tanggal 26-27 November 2014 terjadi insiden kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada ibu-ibu yang memblokir jalan masuk ke tapak pabrik. Aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan mengakibatkan ibu-ibu mengalami tindakan sewenang-wenang dalam bentuk pemukulan, kekerasan verbal, dan penganiayaan hingga beberapa ibu-ibu mengalami pingsan di tempat kejadian. Warga mengadukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan pada tanggal 01 Desember 2014 kepada Polisi Daerah (POLDA) Jawa Tengah.

Sementara aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang sedang berlangsung. Perusahaan semen yang lainnya diam-diam telah mengajukan proses izin lingkungan pendirian pabrik semen dan penambangan batu kapur di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen yang masih merupakan satu kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Kedua kecamatan tersebut termasuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo, Kabupaten Pati yang perlu dilindungi. Bahkan pada tanggal 03 September 2014 sudah memasuki sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Hotel Pati.

Tanggal 18 Desember 2014 Jaringan Masyarakat Petani Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang dipelopori oleh sedulur sikep melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Tengah. Unjuk rasa yang bertajuk "JAWA TENGAH DARURAT TAMBANG" dihadiri dari warga Pati, Grobogan, Rembang, Jepara, Kudus, Semarang, Temanggung, Salatiga, Purwokerto, Sragen, Gombong, Magelang, Kebumen, Demak, Wonogiri, Pekalongan dan Batang. Tuntutan yang

diajukan yaitu: 1). Membuat Jawa Tengah sebagai lumbung pangan; 2). Menuntut Gubernur Jawa Tengah melakukan pemberhentian sementara tambang di Jawa Tengah; 3). Mendesak Gubernur Jawa Tengah wujudkan visi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan; 4). Mengecam aparat keamanan yang melakukan tindakan represif terhadap pejuang lingkungan.

Pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang yang ditolak oleh petani Pegunungan Kendeng Utara klaimnya selalu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Melalui bentuk investasi dengan jumlah yang besar, harapannya penduduk di sekitar pabrik dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga pendapatan per kapita masing-masing keluarga petani mampu meningkat. Sebenarnya tanpa pembangunan pabrik semen sekalipun kehidupan petani Pegunungan Kendeng Utara sudah sejahtera baik secara lahir maupun bathin. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi alam yang menyediakan jumlah air yang melimpah ruah sehingga mengakibatkan kondisi sosial masyarakat mengalami kemakmuran dengan tidak saling memperebutkan sumber daya alam yang tersedia.

Perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara yang berpusat pada pembangunan pabrik semen menandakan bahwa proses industrialisasi yang terjadi di Indonesia perlu ditinjau ulang dari segi lingkungan hidup. Terlebih pasca rezim Orde Baru upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup terus diwacanakan, semestinya pemerintah dalam hal ini tegas menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang peduli terhadap daya dukung ekologi suatu kawasan. Apalagi setiap perusahaan yang hendak mendirikan pabrik berdampak besar wajib memenuhi perizinan lingkungan hidup yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kontradiksi pembangunan pabrik semen yang dilawan oleh petani Pegunungan Kendeng Utara membuktikan bahwa pembangunan sebagai sebuah “titik didih politik kebudayaan”, yang menekankan peran pembangunan dalam merapatkan dan memperbesar perlawanan yang bersifat material dan sekaligus simbolis (Donald Moore dalam Perreault 2015: 53). James Scott dalam salah satu

sumbangan terpenting pada kajian politik pedesaan menerangkan bahwa gerakan pedesaan memang selalu bersifat lokal dan terpecah-pecah, hal ini menunjukkan bentuk-bentuk pembangkangan awam keseharian dan menghindari konfrontasi terbuka dengan negara atau kelas-kelas yang lebih kaya (dalam Moyo 2015: 137).

Wolf (1985: 190) menyatakan bahwa gerakan protes dalam bentuk yang sederhana di kalangan petani seringkali berpusat pada mitos tentang suatu tatanan sosial yang lebih adil dan lebih sama rata dibandingkan dengan tatanan sosial sekarang yang lebih bersifat hirarkis. Mitos-mitos seperti itu bisa memandang ke belakang, kepada suatu kelahiran kembali zaman emas yang adil dan berdasarkan persamaan di zaman lampau, atau ke depan, menuju pembentukan suatu tatanan baru di bumi, suatu perubahan yang penuh dan revolusioner dari kondisi-kondisi sekarang. Gerakan protes petani dalam kategori Eric Wolf umumnya oleh para peneliti ilmu-ilmu humaniora diidentifikasi sebagai bentuk-bentuk perlawanan politik yang berangkat dari suatu sikap keagamaan yang bersifat messianistik.

Perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara seolah-olah menanggapi deklarasi sejarawan terkenal Eric Hobsbawm (1994) yakni perubahan paling dramatis dalam abad kedua puluh yang menjadi pembeda selamanya dari dunia masa lalu adalah kematian petani (dalam Rachman 2015: 162). Tanggapan petani Pegunungan Kendeng Utara terhadap kematian petani itu berupa tindakan-tindakan politik mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupannya untuk generasi mendatang. Perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang merupakan titik pertemuan antara krisis ekologi dan agraria yang kemungkinan di masa mendatang menjadi kenyataan sosial yang harus dihadapi seluruh umat manusia di muka bumi..

Menurut Ardianto (2015: XV-XVI) darurat ekologi teridentifikasi karena daerah yang akan ditambang merupakan kawasan lindung geologi yang harusnya dikonversi. Sedangkan darurat agraria ditunjukkan dari model-model pemaksaan dalam pendirian pabrik semen. Lahan-lahan yang akan ditambang sama sekali belum dibebaskan. Artinya, cukup mudah memprediksi bahwa dikemudian hari

akan terjadi praktik perampasan lahan (*land grabbing*) yang dilakukan negara maupun korporasi.

Kawasan karst bagian selatan Rembang yang menjadi kawasan pembangunan dan penambangan PT. SI sesungguhnya merupakan kawasan imbuhan air terbesar yang dikenal sebagai Pegunungan Watuputih atau kawasan karst Watuputih. Fungsinya sebagai pengimbuhan air terbesar di Rembang membuat Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih akhirnya ditetapkan sebagai CAT lewat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Dalam lampiran Keppres No 26 Tahun 2011 poin 124, CAT Watuputih masuk dalam klasifikasi CAT B yaitu CAT yang berada di lintas kabupaten antara Kabupaten Rembang dan Blora. Penetapan CAT Watuputih sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi dan dikelola dengan optimal agar terhindar dari kerusakan tertuang jelas dalam pasal 25 Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lukiarti et al. 2015: 2-3)

Berdasarkan kondisi kawasan karst dengan melimpahnya air dan rata-rata mata pencaharian penduduk adalah bertani, maka perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara merupakan suatu konsekuensi logis apabila kawasan tersebut dibangun pabrik semen. Menurut Salim (1979: 206) air merupakan sumber penghidupan bagi petani di daratan. Lebih kurang 80% keseluruhan penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan berangkat dari sektor pertanian. Pertanian di Indonesia yang hampir sebagian besar adalah pertanian basah merupakan pertanian penghasil tanaman yang memerlukan banyak air. Pencemaran air daratan (krisis air) langsung memukul jutaan petani di daerah pedesaan yang merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia.

Perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara sampai sekarang masih berlanjut dengan konsisten, disiplin, dan penuh solidaritas dari berbagai kalangan. Di lain sisi pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang juga masih beroperasi dengan segala macam manipulasi dan intrik politik tentang perijinan lingkungan hidup. Walaupun Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahap 1 yang dikeluarkan oleh Presiden (Ir. Joko Widodo) menghentikan sementara

pembangunan pabrik semen, tetapi pihak korporasi tetap berusaha melanjutkan megaproyek tambang terbesar di Jawa Tengah itu. Perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara yang diwakili oleh ibu-ibu juga mempunyai landasan kuat pula yaitu menyelamatkan lingkungannya dari ancaman tambang semen demi generasi mendatang.

Perjuangan petani Pegunungan Kendeng Utara mengalami puncaknya ketika salah satu petani perempuan yang bernama Yu Patmi meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017 setelah mengecor kakinya di depan Istana Negara, Jakarta. Kematian Yu Patmi menandakan bahwa panjang umur perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara justru semakin konsisten dengan intensitas yang meningkat. Menurut petani Pegunungan Kendeng Utara memperjuangkan kehidupan bagi anak cucu lebih penting dari pada harus menyerahkan kehidupannya bagi pembangunan pabrik semen yang merusak lingkungan. Terlebih Yu Patmi sebagai perempuan mengajarkan kepada publik bahwa peran perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya tidak dapat diperlakukan diskriminatif.

Harian *Kompas* (12/9/2017) menerbitkan berita tentang aksi sejumlah warga Rembang, Jawa Tengah di kawasan Monumen Nasional di seberang Istana Merdeka, Jakarta, terus berlangsung hingga Senin (11/9). Mereka bertahan untuk mempertanyakan kegiatan penambangan batu gamping di wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih, Rembang yang terus berlangsung. Setelah dikeluarkannya KLHS Tahap 1 pihak pabrik semen tidak mematuhi rekomendasi agar aktivitas penambangan oleh semua pihak di kawasan CAT Watuputih dihentikan. Aksi petani yang dilakukan oleh mayoritas perempuan dan ibu-ibu ini tidak akan berhenti sampai pabrik semen berhenti total, sementara KLHS Tahap 2 akan segera dikeluarkan pihak PT. SI masih tetap beroperasi di sekitar kawasan konservasi CAT Watuputih.

Kematian salah satu petani Pegunungan Kendeng Utara dan aksi terus-menerus tanpa kenal lelah membuat gerakan perlawanan petani ini merupakan sejenis perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlawanan sehari-hari yang dilakukan di pedesaan sekitar Pegunungan Kendeng Utara terutama di Kabupaten

Rembang yang klandestain dan lebih individual seperti yang ditekankan James Scott (1990) dan Benedict Kerkvliet (1990) di Filipina termasuk perjuangan hak (*rightfull resistance*) dalam konteks kebebasan dari rasa takut. Perlawanan politik Petani Pegunungan Kendeng Utara di sini menekankan pentingnya bagaimana peran mobilisasi petani dalam memperjuangkan hak yang bersifat kolektif dan militan untuk mendorong proses demokratisasi (Franco dan Boras 2015: 225).

Fenomena ini penting untuk dikaji secara sistematis supaya bisa diperoleh pengetahuan cukup memadai mengenai kompleksitas gerakan perlawanan politik Petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Maka, memutuskan untuk meneliti dan mengkaji dengan semangat ingin tahu yang besar mengenai fenomena terkait maupun implikasi dan sumbangannya di bidang keilmuan menjadi sangat penting dikerjakan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keadaan sosial-ekonomi petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana bentuk perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimanajenis-jenis tuntutan petani Pegunungan Kendeng Utara saat proses pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah berlangsung?
4. Bagaimana keterlibatanpetani perempuanPegunungan Kendeng Utara saat prosespenolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan keadaan sosial-ekonomi petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

2. Mendeskripsikan bentuk perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Mendeskripsikan jenis-jenis tuntutan petani Pegunungan Kendeng Utara saat proses pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah berlangsung.
4. Mendeskripsikan keterlibatan petani perempuan Pegunungan Kendeng Utara saat proses penolakan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Membantu akademisi, aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan hidup, pemerintah, dan pengusaha untuk memperluas pengetahuan dan mempertajam perasaan di bidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya dalam mengenali karakter petani dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan masukan pada pihak-pihak terkait untuk memperhatikan kembali pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup ditengah arus industrialisasi besar-besaran di Indonesia.
- b. Menjadi referensi bagi masyarakat dalam beraksi dan berrefleksi di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan gambaran dalam penelitian ini.
- c. Menjadi acuan bagi guru PPKn dalam memberikan pembelajaran kepribadian dan karakter nasional yang terkait dengan perlawanan politik petani.
- d. Menjadi salah satu sumber bagi siswa dan guru terkait dengan pembelajaran kepribadian dan karakter nasional di sekolah.